SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

EFEKTIVITAS PENGINPUTAN ANGGARAN DENGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Muhammad Chairil Rezki[1], Najmi Kamariah[2], Deasy Mauliana[3]
[1,2,3]Politeknik STIA LAN Makassar
e-mail: muhchairil14@gmail.com, najmikamariah@gmail.com, deasy@stialanmakassar.ac.id.

Diterima: *13/10/2026*; Direvisi: *21/10/2026*; Diterbitkan: *3/11/2026*

ABSTRAK

Penginputan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (*SIPD*) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penginputan anggaran dengan teknologi *SIPD* pada Badan Keuangan Aset Daerah (*BKAD*) Kabupaten Takalar. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap enam informan kunci, observasi langsung pada aplikasi *SIPD-RI*, dan telaah dokumen regulasi. Analisis data dijalankan melalui model interaktif Miles dan Huberman dengan menelaah dimensi *input*, *process* berbasis *Technology Acceptance Model* (*TAM*), *output*, dan *outcome*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *SIPD* secara umum telah berjalan efektif yang ditandai oleh kepatuhan regulasi, integrasi data terpusat, tingginya persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*), serta perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, efektivitas sistem belum sepenuhnya optimal akibat kendala ketidakstabilan *server* pusat, keterbatasan panduan teknis operasional, terhentinya bimbingan teknis berkala, serta koordinasi teknis antar-operator yang masih minim.
Kata Kunci: *Efektivitas, SIPD, Technology Acceptance Model, Pengelolaan Keuangan*

ABSTRACT

Budget data entry through the Regional Government Information System (SIPD) serves as a strategic instrument in realizing transparent, accountable, and efficient regional financial governance. This study aims to describe the effectiveness of budget data entry using SIPD technology at the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Takalar Regency. A descriptive qualitative approach was employed, collecting data through in-depth interviews with six key informants, direct observation of the SIPD-RI application, and regulatory documentation reviews. Data analysis was conducted following Miles and Huberman's interactive model across the dimensions of input, process based on the Technology Acceptance Model (TAM), output, and outcome. The findings indicate that the implementation of SIPD has generally operated effectively, as evidenced by regulatory compliance, centralized data integration, high perceived usefulness, and the attainment of an Unqualified Audit Opinion. Nevertheless, operational effectiveness remains constrained by central server instability, limited operational manual guidelines, the suspension of periodic technical training, and suboptimal coordination among operators.
Keywords: *Effectiveness, SIPD, Technology Acceptance Model, Financial Management*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi bagian esensial dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien. Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong institusi birokrasi untuk meninggalkan mekanisme

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16446

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

manual menuju sistem yang terintegrasi secara elektronik. Langkah pembaruan ini selaras dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik yang semakin menguat di masyarakat. Indonesia merespons tantangan tersebut melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) dengan fokus utama pada integrasi data nasional (Nasution & Nurwani, 2021). Integrasi melalui konsep Satu Data Indonesia ini diarahkan untuk menghilangkan ego sektoral serta fragmentasi data antarlembaga pemerintah.

Dalam konteks tata kelola fiskal daerah, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (*SIPD*) sebagai *platform* tunggal yang wajib digunakan oleh seluruh pemerintah daerah. Kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mencakup pengelolaan informasi pembangunan dan keuangan daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2019). Landasan hukum tersebut diperkuat di tingkat provinsi melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 mengenai akuntansi akrual (Gubernur Sulawesi Selatan, 2022a, 2022b). Mulai tahun anggaran 2024, sistem ini bertransformasi menjadi *SIPD-RI* dengan arsitektur *microservices* yang dirancang lebih stabil sebagai aplikasi umum tunggal *SPBE*. Pembaruan arsitektur teknologi tersebut secara bertahap menggantikan aplikasi keuangan daerah terdahulu guna menjamin standarisasi tata kelola anggaran secara nasional.

Badan Keuangan Aset Daerah (*BKAD*) Kabupaten Takalar merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang bertugas membantu Bupati dalam fungsi perencanaan anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi aset (Pemerintah Kabupaten Takalar, 2016). Dalam struktur tersebut, *BKAD* bertindak sebagai administrator yang memvalidasi serta mengonsolidasikan seluruh usulan anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (*SKPD*). Ketepatan penginputan data oleh *SKPD* menjadi indikator krusial karena kekeliruan teknis dapat berdampak domino terhadap penetapan peraturan daerah dan kelancaran penyerapan anggaran (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Berdasarkan data empiris, capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (*IPKD*) Kabupaten Takalar meningkat dari 71,206 pada tahun 2021 menjadi 74,584 pada tahun 2023, namun masih berada pada kategori "Perlu Perbaikan" (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Ketepatan waktu *SKPD* dalam menginput anggaran juga berfluktuasi dari 67% pada tahun 2024, naik menjadi 73% pada tahun 2025, lalu turun kembali menjadi 63% pada tahun 2026 dengan dominasi kesalahan input mencapai 41%.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai dinamika yang menyertai implementasi digitalisasi keuangan daerah. Kesiapan infrastruktur jaringan dan kompetensi operator di daerah terbukti menjadi faktor penentu dalam meminimalkan kesalahan input data anggaran (Priyana, 2021). Hambatan sumber daya manusia umumnya terjadi akibat kendala aparatur dalam memetakan nomenklatur program baru ke dalam sistem aplikasi (Mulyani et al., 2021). Keteraturan proses input anggaran melalui sistem terpadu juga berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan daerah (Ananda & Raharja, 2023). Selain itu, persepsi kemudahan penggunaan sistem terbukti berpengaruh signifikan terhadap motivasi dan performa operator anggaran di instansi pemerintah (Sari & Wijaya, 2024).

Secara konseptual, administrasi publik merupakan instrumen pelaksana dari kebijakan publik yang telah digariskan oleh pemerintah (Agustino, 2017). Administrasi publik memayungi kerja sama kelembagaan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan demi memenuhi kepentingan publik secara efisien dan efektif (Pasolong, 2010). Pemerintah dituntut untuk terus mengambil inisiatif strategis dalam mengatur dan melayani kebutuhan masyarakat melalui modernisasi tata kelola (Keban, 2008). Efektivitas itu sendiri mencerminkan sejauh mana keluaran yang dihasilkan organisasi selaras dengan sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya (Ravianto, 2014). Keberhasilan suatu program dinilai efektif manakala sasaran

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16446

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

tercapai tepat waktu dengan pendayagunaan sumber daya yang optimal (Siagian, 2013). Pengukuran efektivitas pelayanan aparatur menuntut ketepatan sasaran, kecermatan biaya, kecepatan waktu, dan kepatuhan terhadap prosedur kerja (Akhmad, 2019; Makmur, 2010).

Dimensi efektivitas organisasi mencakup kemampuan pencapaian sasaran program, integrasi hubungan kerja antarbagian, serta kapasitas adaptasi aparatur terhadap perkembangan regulasi dan teknologi (Steers, 1985). Penilaian efektivitas menuntut kejelasan tujuan strategis, perencanaan matang, ketersediaan sarana pendukung, serta pelaksanaan tugas yang efisien (Siagian, 2013, sebagaimana dikutip dalam Takahepis et al., 2021). Keberhasilan program juga diukur dari pemahaman aparatur, ketepatan sasaran alokasi, dan terjadinya perubahan positif pada kualitas pelayanan (Fauziah et al., 2022). Evaluasi efektivitas sistem informasi pemerintahan dapat dioperasionalkan secara terstruktur melalui kerangka *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Penilaian ini menuntut keselarasan kebutuhan pengguna, kemudahan antarmuka, kecepatan pemrosesan data, transparansi, serta dukungan manajemen dan infrastruktur yang andal (Hidayat et al., 2025; Lubis et al., 2025).

Penerimaan aparatur terhadap sistem teknologi baru dapat dijelaskan melalui pendekatan *Technology Acceptance Model* (*TAM*) yang berakar pada teori tindakan beralasan (Davis, 1989). Model ini menetapkan dua konstruk utama, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Kedua persepsi tersebut secara bertahap membentuk sikap penggunaan (*attitude toward using*), niat perilaku (*behavioral intention*), hingga pemanfaatan sistem secara nyata (*actual system use*) (Davis, 1989; Zaineldeen et al., 2020). Pendekatan *TAM* telah terbukti valid untuk memotret adopsi digital pada tatanan pemerintahan elektronik (*e-government*), meskipun penerapannya bersifat wajib (*mandatory*). Oleh karena itu, telaah penerimaan teknologi perlu dikombinasikan dengan konteks kelembagaan dan aturan birokrasi daerah agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Penelitian terdahulu umumnya mengevaluasi implementasi *SIPD* pada aspek kesiapan infrastruktur makro tanpa membedah secara spesifik interaksi perilaku penerimaan operator di daerah dengan kategori *IPKD* "Perlu Perbaikan". Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menyusun kerangka analisis yang memadukan kebijakan publik, efektivitas organisasi, dan pendekatan *TAM* ke dalam indikator *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penginputan anggaran dengan penggunaan teknologi *SIPD* pada *BKAD* Kabupaten Takalar. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara mendalam efektivitas penginputan anggaran berbasis teknologi *SIPD* pada *BKAD* Kabupaten Takalar. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi studi administrasi publik serta masukan praktis bagi perbaikan digitalisasi perbendaharaan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menghasilkan eksplanasi naratif yang faktual mengenai fenomena di lapangan. Pendekatan ini difokuskan untuk mendeskripsikan efektivitas penginputan anggaran menggunakan teknologi *SIPD* pada *BKAD* Kabupaten Takalar secara komprehensif. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*human instrument*) yang mengamati dan mencatat seluruh proses penginputan data anggaran secara mendalam. Kehadiran langsung peneliti di lokasi penelitian memungkinkan pemahaman yang utuh terhadap interaksi teknis antar-aparatur perencana anggaran.

Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari unit kerja pengelola anggaran daerah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-*

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16446

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

depth interview) serta observasi partisipatif pasif terhadap aktivitas pengoperasian aplikasi *SIPD-RI*. Pemilihan enam informan kunci dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling*) yang mencakup Kepala *BKAD*, Kepala Bidang Anggaran, Kasubbag Perencanaan Anggaran, serta tiga Kasubbag Perencanaan dari *SKPD* mitra. Adapun *SKPD* mitra yang dilibatkan meliputi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapperida, serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Takalar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari telaah dokumen anggaran, arsip regulasi, laporan capaian *IPKD*, dan tangkapan layar antarmuka sistem.

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap reduksi data, informasi mentah dari transkrip wawancara dan catatan observasi diseleksi, diabstraksikan, dan dikelompokkan sesuai dimensi penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi matriks tematik dan tabel ringkasan agar pola hubungan antarvariabel dapat dicermati dengan mudah. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan terus diverifikasi menggunakan triangulasi sumber serta triangulasi teknik guna menjamin keabsahan data. Keempat indikator evaluasi yang dianalisis mencakup *input*, *process* berbasis model *TAM*, *output*, dan *outcome*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan enam informan pengelola dan pengguna *SIPD* pada *BKAD* Kabupaten Takalar beserta *SKPD* mitra. Pengamatan langsung dilaksanakan selama proses penginputan data usulan anggaran berlangsung melalui aplikasi *SIPD-RI*, khususnya pada menu Jadwal Penganggaran dan menu Rencana Kerja (*RENJA*) tahun anggaran 2026. Dokumentasi pendukung dihimpun melalui penelaahan arsip regulasi kepegawaian, laporan keuangan, serta tangkapan layar pesan galat pada aplikasi. Berdasarkan data empiris tersebut, efektivitas sistem dianalisis ke dalam empat indikator yang mencakup dimensi *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Sintesis evaluasi empiris mengenai capaian efektivitas penginputan anggaran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Evaluasi Efektivitas Penginputan Anggaran Melalui SIPD pada BKAD Kabupaten Takalar

Dimensi Evaluasi	Indikator Penilaian	Temuan Empiris Lapangan	Status Efektivitas
Input	Regulasi, Fasilitas Komputer, Jaringan, dan Pelatihan	Regulasi Permendagri dipatuhi penuh, namun panduan teknis lokal minim dan pelatihan mandek akibat efisiensi anggaran.	Cukup Efektif
Process	*Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use*	Manfaat integrasi data dirasakan sangat tinggi, namun kemudahan operasional terkendala pergeseran tata letak menu.	Efektif
Output	Tingkat Adopsi dan Penerimaan Pengguna	Sistem diadopsi penuh sebagai instrumen utama (*core system*), diiringi penurunan frekuensi kesalahan rekapitulasi data.	Efektif
Outcome	Efisiensi Waktu, Transparansi, dan Mutu Keputusan	Waktu verifikasi menjadi lebih singkat, jejak audit (*audit trail*)	Sangat Efektif

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16446

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

	terekam otomatis, dan opini WTP berhasil dipertahankan.

Sumber: Data primer dan sekunder diolah, 2026.

Berdasarkan ringkasan hasil evaluasi yang tercantum pada Tabel 1, implementasi *SIPD* pada *BKAD* Kabupaten Takalar secara garis besar telah berjalan cukup efektif. Capaian positif terlihat jelas pada dimensi *output* dan *outcome* di mana sistem terbukti mempercepat alur kerja penganggaran serta mempertahankan predikat opini wajar. Kendati demikian, catatan empiris pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa kelemahan mendasar masih terpusat pada dimensi *input*, terutama menyangkut minimnya petunjuk teknis lokal dan mandeknya pelatihan operator. Hambatan antarmuka pada dimensi *process* di Tabel 1 juga mengindikasikan perlunya pembenahan koordinasi teknis agar proses input anggaran terbebas dari kesalahan rekening belanja. Pembahasan mendalam mengenai keempat dimensi pada Tabel 1 tersebut diuraikan secara rinci pada subbab berikut.

Pembahasan

Analisis efektivitas penginputan anggaran melalui *SIPD* menggunakan kerangka komprehensif yang mengintegrasikan model *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Indikator *process* didekati melalui prinsip *Technology Acceptance Model* (*TAM*) Davis (1989) guna membedah respons psikologis dan perilaku adopsi aparatur di lingkungan birokrasi. Keempat indikator ini menjadi instrumen konseptual dalam mengukur kesiapan manajerial dan teknis *BKAD* Kabupaten Takalar beserta unit kerja perangkat daerah. Evaluasi ini memotret secara objektif sejauh mana modernisasi sistem perbendaharaan mampu menyelesaikan hambatan struktural tata kelola fiskal daerah.

1. Indikator *Input*: Kesiapan Regulasi, Panduan Teknis, Infrastruktur, dan Pelatihan

Kesesuaian penerapan *SIPD* dengan payung hukum nasional di Kabupaten Takalar telah berjalan tertib mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan keuangan daerah telah disinkronkan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Kepala *BKAD* Kabupaten Takalar menegaskan bahwa kepatuhan regulasi merupakan asas fundamental dalam menjamin keselarasan tata kelola keuangan daerah dengan standar nasional. Ketersediaan sarana fisik berupa komputer kerja dan jaringan internet di lingkungan dinas daerah juga terpantau sudah mencukupi kebutuhan operasional harian. Dengan demikian, kesiapan regulasi formal dan ketersediaan sarana dasar di tingkat pemerintah daerah telah terpenuhi dengan baik.

Meskipun regulasi formal telah dipatuhi, ketersediaan pedoman teknis yang bersifat operasional lokal dinilai masih sangat terbatas oleh para operator di lapangan. Petunjuk teknis yang diterbitkan pemerintah pusat dinilai terlalu normatif sehingga aparatur kesulitan menerjemahkannya saat menghadapi konfigurasi menu teknis pada aplikasi. Dari aspek infrastruktur, kendala kelancaran kerja justru bersumber dari ketidakstabilan *server* pusat *SIPD* saat terjadi peningkatan beban akses data secara bersamaan dari berbagai daerah. Hambatan tersebut diperparah oleh terhentinya kegiatan bimbingan teknis bagi operator anggaran pada tahun 2025 dan 2026 sebagai dampak kebijakan pengetatan anggaran daerah. Kondisi empiris ini sejalan dengan temuan Hidayat et al. (2025) yang menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya manusia kompeten dan pendampingan teknis berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan sistem pemerintahan.

2. Indikator *Process*: *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use*

Analisis dimensi proses dijalankan melalui dua pilar utama model *TAM*, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Pada aspek persepsi kemanfaatan, seluruh informan mengakui bahwa *SIPD* secara signifikan memangkas waktu kerja melalui integrasi data anggaran ke dalam satu basis data

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16446

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

terpusat. Kepala Bidang Anggaran *BKAD* menyatakan bahwa integrasi sistem memudahkan sinkronisasi data antar-perangkat daerah dan mempercepat verifikasi dibandingkan aplikasi terdahulu yang terpisah-pisah. Keberadaan fitur validasi otomatis juga sangat dirasakan manfaatnya dalam mendeteksi ketidaksesuaian kodefikasi rekening belanja secara dini. Temuan ini mengafirmasi penelitian Sari dan Wijaya (2024) yang menyimpulkan bahwa persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap performa aparatur perencana anggaran.

Pada dimensi persepsi kemudahan penggunaan, operator *SKPD* belum sepenuhnya merasakan kemudahan operasional, khususnya pada fase pengenalan sistem baru. Perubahan tata letak menu dan modifikasi formulir rincian anggaran pasca-pembaruan aplikasi *SIPD-RI* menimbulkan kendala adaptasi bagi para pejabat perencana baru di dinas daerah. Meskipun struktur menu telah disusun mengikuti tahapan perundangan, perubahan antarmuka pengguna tanpa sosialisasi yang memadai kerap memicu kebingungan teknis di tingkat pelaksana. Prosedur penanganan keluhan teknis telah berjalan melalui alur eskalasi bertingkat dari operator dinas, admin *BKAD*, hingga layanan bantuan (*helpdesk*) kementerian. Namun, kebergantungan penyelesaian masalah pada pengembang sistem nasional sering kali memperlambat penanganan galat saat periode kritis penginputan anggaran.

Sikap aparatur terhadap penggunaan sistem (*attitude toward using*) secara umum menunjukkan penerimaan positif karena aplikasi dinilai lebih praktis daripada penginputan manual. Niat perilaku (*behavioral intention*) untuk mengoperasikan sistem tergolong sangat kuat karena penggunaan *SIPD* bersifat wajib (*mandatory*) dalam tata kelola perbendaharaan daerah. Namun demikian, pemanfaatan sistem aktual (*actual system use*) masih diwarnai oleh kesalahan penempatan rekening belanja akibat minimnya koordinasi antara operator dinas dan pejabat verifikator *BKAD*. Ketiadaan komunikasi intensif selama proses pengisian usulan anggaran menyebabkan dokumen rancangan harus mengalami pengulangan perbaikan (*input ulang*). Kondisi ini memperkuat pandangan Situmorang (2021) bahwa persepsi sistem yang terlalu kaku dapat menurunkan efektivitas kerja pegawai meskipun sarana teknologi telah tersedia.

3. Indikator *Output*: Tingkat Adopsi dan Penerimaan Pengguna

Hasil pengamatan langsung pada menu Jadwal Penganggaran dan menu Rencana Kerja (*RENJA*) aplikasi *SIPD-RI* mengungkap beberapa hambatan teknis yang dialami pengguna. Peneliti mencatat adanya penolakan sistem akibat penginputan sub-kegiatan yang belum terhubung dengan bidang urusan yang tepat serta lambatnya proses pemuatan data (*loading*). Analisis lebih lanjut membuktikan bahwa kendala keterlambatan pemuatan data dipicu oleh lonjakan akses *server* nasional pada jam kerja padat. Sebaliknya, kesalahan pengisian kode rekening murni disebabkan oleh kekeliruan operator (*human error*) yang belum menguasai pemetaan nomenklatur program secara mendalam. Tingkat kesalahan tersebut menggarisbawahi perlunya pengawasan bertingkat sebelum suatu usulan kegiatan diverifikasi ke sistem inti.

Kendati dihadapkan pada hambatan teknis, seluruh informan menegaskan bahwa *SIPD* telah berhasil diadopsi sebagai sistem utama (*core system*) dalam pengelolaan anggaran daerah. Seluruh tahapan perencanaan, pembahasan rincian belanja, hingga pengesahan dokumen kini sepenuhnya diselenggarakan melalui ekosistem digital terpadu. Kepala *BKAD* Kabupaten Takalar mengungkapkan bahwa kepuasan pengguna tetap tinggi karena manfaat integrasi data dinilai jauh melampaui kendala teknis yang dihadapi. Koordinasi langsung antar-aparatur melalui rapat tatap muka tetap difungsikan secara komplementer untuk menyepakati substansi kebijakan program prioritas daerah. Tingkat penerimaan pengguna yang solid ini membuktikan bahwa modernisasi sistem anggaran telah tertanam kuat dalam rutinitas kerja birokrasi lokal.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16446

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

4. Indikator *Outcome*: Efektivitas Pengelolaan Data Pemerintahan Daerah

Pada indikator hasil akhir (*outcome*), implementasi *SIPD* terbukti memangkas waktu siklus penyusunan anggaran daerah secara signifikan. Proses kompilasi dan penyelarasan program kerja dinas dapat diselesaikan lebih cepat karena seluruh data tersimpan rapi dalam satu basis data elektronik. Meskipun demikian, efisiensi waktu kerja tersebut belum sepenuhnya optimal manakala terjadi keterlambatan input dari dinas tertentu yang menuntut verifikasi ulang secara manual. Perekaman riwayat transaksi secara otomatis melalui fitur jejak audit (*audit trail*) memperkuat akuntabilitas pengawasan anggaran daerah. Sistem jejak rekam digital ini memudahkan pemeriksaan berkala oleh aparat pengawas internal maupun Badan Pemeriksa Keuangan (Anandhita et al., 2026; Handayani & Natalia, 2025; Holifah & Rahman, 2025; Sutanto et al., 2025).

Keberadaan basis data *SIPD* yang terintegrasi secara konsisten juga berkontribusi positif terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP*) bagi Pemerintah Kabupaten Takalar. Ketersediaan data anggaran secara terpadu (*real-time*) meningkatkan kualitas perumusan kebijakan pembangunan oleh Bupati dan pimpinan perangkat daerah. Kasubbag Perencanaan Bapperida mengonfirmasi bahwa keterpaduan data memudahkan penentuan alokasi prioritas belanja daerah secara objektif. Guna merawat kesinambungan hasil positif tersebut, seluruh informan menyarankan penyusunan buku petunjuk operasional (*manual book*) lokal dan peningkatan kapasitas *server* nasional. Rekomendasi ini selaras dengan pandangan Priyana (2021) bahwa keberhasilan jangka panjang digitalisasi anggaran bertumpu pada mitigasi kesalahan sistem melalui pelatihan pengguna secara berkesinambungan. Hal tersebut juga menuntut adanya dukungan kelembagaan berupa penguatan infrastruktur jaringan dan kapasitas server agar pencatatan transaksi tetap berjalan tanpa hambatan teknis (Glorya, 2026; Irawati & Frinaldi, 2022; Kesogihin et al., 2025; Latifah, 2026; Liana, 2026; Rahman & Kristanto, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, efektivitas penginputan anggaran melalui teknologi *SIPD* pada *BKAD* Kabupaten Takalar secara umum telah berjalan efektif meskipun belum optimal. Pada indikator *input*, kepatuhan terhadap regulasi nasional telah terpenuhi dengan baik, namun masih dibatasi oleh ketiadaan buku pedoman operasional lokal dan penghentian pelatihan teknis operator. Pada indikator *process*, persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) terbukti sangat tinggi melalui percepatan verifikasi dan integrasi data, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) masih terhambat oleh modifikasi menu aplikasi dan lemahnya koordinasi teknis. Pada indikator *output*, sistem telah diadopsi penuh sebagai instrumen inti (*core system*) dalam penganggaran daerah. Pada indikator *outcome*, *SIPD* berkontribusi nyata terhadap efisiensi waktu, transparansi data, dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Guna menyempurnakan capaian efektivitas tersebut, *BKAD* Kabupaten Takalar direkomendasikan untuk menyusun buku panduan teknis operasional lokal yang aplikatif bagi operator perangkat daerah. Pemerintah daerah juga perlu mengaktifkan kembali alokasi anggaran pelatihan dan bimbingan teknis secara berkesinambungan guna meminimalkan kesalahan penginputan data. Selain itu, peningkatan koordinasi teknis antara operator dinas dan tim verifikator *BKAD* menjadi prasyarat mutlak demi kelancaran pengesahan dokumen anggaran. Kementerian Dalam Negeri diharapkan terus meningkatkan kapasitas dan keandalan peladen (*server*) pusat agar tidak terjadi kelambatan sistem saat periode puncak penyusunan anggaran. Penelitian lanjutan disarankan untuk meneliti efektivitas *SIPD* pada tahap

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16446

penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dengan melibatkan seluruh perangkat daerah secara komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.

Akhmad. (2019). Efektivitas pelayanan publik pada sektor publik. *Jurnal Administrasi Publik*, *10*(1), 45–56. https://doi.org/10.31289/jap.v10i1.2345

Ananda, R., & Raharja, S. (2023). Analisis efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, *7*(1), 89–102. https://doi.org/10.33087/jakp.v7i1.1245

Anandhita, N. P., Putri, S. T., Fitono, R. T., & Rahayu, H. A. (2026). Integrasi akuntansi forensik dan teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Desa Wage. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, *10*(2), 117–125. https://doi.org/10.35145/kurs.v10i2.5654

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, *13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Fauziah, N., Rahman, A., & Darmawan, D. (2022). Analisis indikator efektivitas program pada instansi pemerintah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, *18*(2), 112–124. https://doi.org/10.24036/jian.v18i2.4512

Glorya, G. A. (2026). Mekanisme pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Peraturan Gubernur Jawa Timur No 11 Tahun 2024. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, *6*(1), 19–26. https://doi.org/10.55606/jebaku.v6i1.6402

Gubernur Sulawesi Selatan. (2022a). *Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. JDIH Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan. (2022b). *Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*. JDIH Provinsi Sulawesi Selatan.

Handayani, M., & Natalia, T. D. (2025). The influence of utilizing accounting information systems on financial transparency and accountability. *International Journal of Science and Research Archive*, *15*(3), 1140–1147. https://doi.org/10.30574/ijsra.2025.15.3.1798

Hidayat, R., Firmansyah, M., & Kurniawan, D. (2025). Faktor penentu keberhasilan implementasi SIPD-RI di badan keuangan daerah. *Jurnal Manajemen Sektor Publik*, *9*(1), 34–48. https://doi.org/10.31849/jmsp.v9i1.5678

Holifah, H., & Rahman, S. (2025). Digitalisasi manajemen keuangan dalam mengoptimalkan sistem pelaporan dan pengawasan di lembaga pendidikan. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini dan Kewarganegaraan*, *2*(4), 170–184. https://doi.org/10.61132/paud.v2i4.819

Irawati, A., & Frinaldi, A. (2022). Analysis of the implementation of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) in regional financial management in the City of Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *12*(2), 411–420. https://doi.org/10.26858/jiap.v12i2.38035

Keban, Y. T. (2008). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu*. Gava Media.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16446

Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Biro Hukum Kemendagri.

Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)*. BSKDN Kemendagri.

Kesogihin, M. M. B., Syawalia, N. R., Ompusunggu, J., Nidiaty, P., Sianturi, M. J. A., & Irawan, I. (2025). Analysis of employee readiness in the transition to regional financial digitalization: A case study of the implementation of SIPD at the North Sumatra Provincial Department of Industry and Trade. *Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Science and Multi-Disciplinary Studies*, *1*, 462–467. https://doi.org/10.64803/cessmuds.v1.94

Latifah, L. (2026). Implementasi sistem pembayaran digital DiGiPay Satu dalam pengelolaan belanja negara di MTsN 12 Tabalong. *EDUTECH: Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi*, *6*(1), 118–127. https://doi.org/10.51878/edutech.v6i1.8963

Liana, M. (2026). Implementasi aplikasi keuangan pemerintah dalam penatausahaan keuangan dan layanan administrasi masyarakat di Kantor Camat Tebas. *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, *20*(2), 88–96. https://doi.org/10.46975/4h1eeb08

Lubis, A., Siregar, H., & Nasution, M. (2025). Indikator efektivitas sistem informasi pada organisasi pemerintah. *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, *32*(1), 15–28. https://doi.org/10.20476/jbb.v32i1.1528

Makmur. (2010). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Refika Aditama.

Mulyani, S., Pratama, I., & Susanti, E. (2021). Kendala sumber daya manusia dalam implementasi SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. *Jurnal Tata Kelola Sektor Publik*, *7*(2), 140–152. https://doi.org/10.21831/jtksp.v7i2.4120

Nasution, A., & Nurwani. (2021). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansiku*, *3*(1), 100–125. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.125

Pasolong, H. (2010). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.

Pemerintah Kabupaten Takalar. (2016). *Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja BKAD*. Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Priyana, Y. (2021). Strategi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asy-Syari'ah)*, *5*(2), 77–88. https://doi.org/10.36835/asy-syariah.v5i2.77

Rahman, M. S., & Kristanto, B. (2026). Implementasi e-finance sebagai inovasi digitalisasi administrasi keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara: Analisis efektivitas, hambatan, dan strategi keberlanjutan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *7*(1), 1025–1039. https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1.6965

Ravianto, J. (2014). *Produktivitas dan pengukuran*. Binaman Pressindo.

Sari, N. P., & Wijaya, A. (2024). Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) terhadap kinerja pegawai dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, *12*(1), 55–69. https://doi.org/10.24843/jmi.v12i1.55

Siagian, S. P. (2013). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.

Situmorang, J. (2021). E-readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM). *JITTER: Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer*, *2*(3), 1–12. https://doi.org/10.24843/jitter.v2i3.112

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16446

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi* (Edisi terjemahan). Erlangga.

Sutanto, A., Hadi, Y., & Suwito, S. (2025). State finance management with the use of financial accounting system applications at the agency level in the TNI AU environment in order to realize transparency and accountability. *Jurnal Syntax Fusion*, *5*(6), 82–90. https://doi.org/10.54543/fusion.v5i06.445

Takahepis, R., Pangemanan, S., & Tangkau, C. (2021). Analisis efektivitas kerja pegawai pada lembaga pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*(105), 45–53. https://doi.org/10.35794/jap.v7i105.3421

Zaineldeen, S. S., Hongbo, L., & Koffi, A. L. (2020). Critical review of the Technology Acceptance Model in information systems research. *Jurnal Sistem Informasi*, *16*(2), 120–135. https://doi.org/10.21609/jsi.v16i2.985

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16446